

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 11, December 2023**

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10300976)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10300976>

Analisis Kebijakan Stunting Melalui Pendekatan Filsafat dan Pengambilan Keputusan Dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak

Amalia Ihsani Mulia Lanasa¹, Marifa Alysia Nurfakhira², Ribka Davianti Putri³

¹²³Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

E-mail : amalia.ihsani@ui.ac.id¹, marifa.alysia@ui.ac.id², ribka.davianti@ui.ac.id³

Abstrak

World Health Organization memiliki standar tingkat prevalensi stunting yakni kurang dari 20%. Menanggapi fenomena stunting tersebut, Kementerian Kesehatan mengupayakan solusi dengan berbagai intervensi. Isu stunting ialah isu yang sangat penting. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui keterkaitan antara pendekatan filsafat dengan kebijakan stunting, hubungan pendekatan filsafat dalam pengambilan keputusan melalui penanganan kebijakan stunting, dan evaluasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan stunting dalam penanganan masalah kesehatan anak. Metode yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur. Perolehan penelitian didapat bahwa stunting ditinjau dari sisi ontologis dari alasan terjadinya, epistemologi meninjau stunting sebagai ilmu baru, aksiologi meninjau stunting dari dampak ilmiah. Selain itu, didapatkan pula hubungan pendekatan filsafat dalam pengambilan keputusan pemerintah melalui penanganan kebijakan stunting, evaluasi pencapaian target dilakukan pada tahun 2030, menandai komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan upaya pencegahan stunting secara holistik dan integratif. Terakhir adalah evaluasi pengambilan keputusan pemerintah melalui kebijakan stunting yang berkaitan dengan penanganan masalah kesehatan anak. Permasalahan stunting tersebut, dalam mengatasi masalah kesehatan anak sangat erat kaitannya dengan penilaian pengambilan keputusan dikarenakan adanya analisis data, kolaborasi antar pemangku kepentingan, infrastruktur, intervensi kesehatan, program prioritas, serta upaya pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Stunting; Ontologi; Epistemologi; Aksiologi; Pengambilan Keputusan

Abstract

World Health Organization has a standard stunting prevalence rate of less than 20%. In response to the stunting phenomenon, the Ministry of Health is seeking solutions with various interventions. The issue of stunting is a very important issue. The purpose of this study is to determine the relationship between the philosophical approach and stunting policy, the relationship between the philosophical approach in decision making through handling stunting policies, and the evaluation of decision making by the government through stunting policies in handling child health problems. The method used is qualitative research with literature studies. The research obtained that stunting is reviewed from the ontological side of the reason for its occurrence, epistemology reviews stunting as a new science, axiology reviews stunting from the scientific impact. In addition, it was also found that the relationship between the philosophical approach in government decision making through handling stunting policies, evaluation of target achievement is carried out in 2030, marking the government's commitment to ensuring the sustainability of stunting prevention efforts in a holistic and integrative manner. Finally, the evaluation of government decision-making through stunting policies related to handling child health problems. The problem of stunting, in overcoming child health problems, is closely related to decision-making assessments due to data analysis, collaboration between stakeholders, infrastructure, health interventions, priority programs, and poverty alleviation efforts.

Keyword: Stunting; Ontology; Epistemology; Axiology; Decision Making

Article Info

Received date: 26 November 2023

Revised date: 30 November 2023

Accepted date: 06 December 2023

PENDAHULUAN

WHO memiliki standar mengenai tingkat prevalensi stunting yakni kurang dari 20%. Pada tahun 2022 tingkat prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 21.6%, sementara pada tahun 2024 Indonesia memiliki target yang ingin dicapai yakni 14% dan termasuk kedalam target RPJMN. Menurut UNICEF, stunting sendiri merupakan kegagalan dalam mencapai potensi pertumbuhan

seseorang selama masa anak-anak. Umumnya disebabkan oleh malnutrisi kronis dan penyakit berulang. Hal tersebut yang menyebabkan seorang anak terbatas dalam kapasitas fisik dan kognitifnya secara permanen. Keluarga merupakan aktor kunci dalam mengatasi penyebab stunting. Kesadaran keluarga akan pemenuhan asupan gizi dan pengasuhan anak yang layak merupakan sebuah prioritas. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan melakukan upaya dengan dua intervensi. Yakni intervensi spesifik dan sensitif. Melalui gizi pada ibu sebelum dan ketika hamil, serta pada anak berusia 6 - 2 tahun. Pada tahun 2020, statistik PBB mencatat bahwa 6,3 juta balita stunting adalah balita Indonesia. Dampak dari stunting yang terjadi sejak kecil akan dirasakan pada saat-saat mendatang dan akan terlambat diatasi. Padahal Indonesia sendiri akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2045. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan permasalahan stunting dapat diatasi serta diperlukannya semua keluarga Indonesia terus bekerja sama membebaskan Indonesia dari stunting.

Isu stunting merupakan permasalahan yang penting. Dikarenakan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru kedepannya. Seperti mempengaruhi era bonus demografi, berkaitan erat dengan kemiskinan, dan masalah dalam kesehatan anak di Indonesia. Dengan demikian, diperlukannya pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui penyebab, nilai-nilai dan etika yang terkait dengan penanganan stunting, faktor-faktor dari stunting, mengetahui langkah efektif untuk menurunkan tingkat stunting di Indonesia, serta memahami dampak dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka prevalensi stunting. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara pendekatan filsafat dengan kebijakan stunting, hubungan pendekatan filsafat dalam pengambilan keputusan melalui penanganan kebijakan stunting, dan evaluasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan stunting dalam penanganan masalah kesehatan anak.

TINJAUAN TEORITIS

a. Pendekatan dalam Filsafat

Cambridge dictionary mengartikan Filsafat sebagai penggunaan akal dalam memahami hal-hal seperti sifat dunia nyata dan eksistensi, penggunaan pengetahuan dan batas-batasnya, serta prinsip-prinsip penilaian moral. Filsafat memiliki peran sentral dalam bidang administrasi publik, yakni menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan kunci dan tema-tema utama dalam proses perumusan kebijakan. Hal tersebut membantu menjawab pertanyaan mendasar mengenai sifat dasar realitas, perolehan pengetahuan, dan pertimbangan etika. Konsep-konsep filsafat memiliki relevansi yang signifikan dalam mengarahkan pemahaman realitas dan pengambilan keputusan dalam administrasi publik. Dapat dilihat melalui tiga pertanyaan kunci Kant, yaitu tentang apa yang dapat diketahui, apa yang harus dilakukan, dan apa yang dapat diharapkan. Cabang filsafat seperti ontologi membantu mengeksplorasi sifat keberadaan dan eksistensi. Sedangkan epistemologi menguraikan akuisisi dan evaluasi pengetahuan serta memberikan wawasan tentang bagaimana pengetahuan diterapkan dalam administrasi publik. Aksiologi, sebagai cabang filsafat lainnya, fokus pada nilai dan etika, memberikan pemahaman mendalam tentang dimensi etis dari pengambilan keputusan dan tindakan administratif. Memasukkan perspektif filosofis dalam penelitian dan praktik administrasi publik membantu mengaudit asumsi, nilai, dan prinsip secara kritis, membimbing pengambilan keputusan dan tata kelola berbasis nilai. Dengan memahami dasar-dasar filosofis administrasi publik, peneliti dan praktisi dapat berkontribusi pada pengembangan pedoman dan standar etika yang lebih matang.

1. Ontologi

Ontologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat keberadaan dan eksistensi. Ontologi mengeksplorasi pertanyaan tentang entitas apa yang ada, sifat-sifatnya, dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dalam konteks administrasi publik, perspektif ontologis relevan untuk memahami sifat dasar dari entitas dan fenomena yang terlibat dalam proses administrasi. Perspektif ontologis dapat menginformasikan diskusi tentang sifat tata kelola pemerintahan publik, peran lembaga, dan hubungan antara berbagai aktor di sektor publik. Dengan mengkaji dasar-dasar ontologis administrasi publik, para peneliti dapat memperoleh wawasan tentang asumsi-asumsi yang mendasari dan kerangka kerja konseptual yang membentuk praktik-praktik dan kebijakan administrasi. Pertimbangan ontologis juga dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan kerangka kerja untuk mempelajari administrasi publik, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat dan dinamika fenomena administrasi.

2. Epistemologi

Menurut *Stanford Encyclopedia of Philosophy* istilah "epistemologi" berasal dari kata Yunani yaitu "*episteme*" yang dapat diartikan sebagai "pengetahuan" atau "pemahaman" dan "*logos*" yang dapat diterjemahkan sebagai "penjelasan" atau "argumen" atau "alasan". Epistemologi termasuk dalam cabang filsafat yang berhubungan dengan studi tentang pengetahuan, termasuk sifat, sumber, dan keterbatasannya. Dalam bidang filsafat, epistemologi telah menjadi subjek perdebatan mengenai bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh dan apakah hanya mengandalkan pengujian teori atau juga melibatkan induksi. Epistemologi Kant menekankan peran persepsi dalam membentuk pengetahuan. Dia berpendapat bahwa pengetahuan manusia terbatas pada fenomena dan bahwa ide-ide tertentu, seperti Tuhan, jiwa, dan dunia, tidak dapat diketahui oleh manusia. Pertimbangan epistemologis relevan dalam administrasi publik karena mereka menginformasikan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, dievaluasi, dan diterapkan dalam pengambilan keputusan administratif dan pengembangan kebijakan. Dengan memasukkan perspektif epistemologis, para peneliti dan praktisi dalam administrasi publik dapat secara kritis menganalisis sumber-sumber dan keterbatasan pengetahuan, memastikan proses pengambilan keputusan yang ketat dan relevan.

3. Aksiologi

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari mengenai nilai-nilai. Termasuk etika dan estetika yang memiliki relevansi signifikan dalam konteks administrasi publik. Sehingga, aksiologi menjadi kunci untuk memahami dimensi etika dan moral dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan administratif. Pertimbangan aksiologi tidak hanya memperkaya diskusi tentang nilai-nilai yang membimbing administrasi publik, seperti keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mengevaluasi efektivitas dan dampak kebijakan serta program administratif. Dengan memasukkan perspektif aksiologi, peneliti dan praktisi administrasi publik dapat secara kritis menilai implikasi etis dari praktik-praktik administratif. Selain itu, dapat berupaya mencapai pengambilan keputusan dan tata kelola yang berbasis nilai. Aksiologi memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menganalisis dan menilai aspek normatif dari administrasi publik, sehingga berkontribusi pada pengembangan pedoman dan standar etika yang membimbing para administrator publik.

b. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah suatu proses kompleks yang melibatkan identifikasi masalah, evaluasi alternatif, dan memilih tindakan yang dianggap paling sesuai. Namun, realitas menunjukkan bahwa keputusan seringkali didasarkan pada penilaian dan pengalaman daripada mengikuti model rasional. Faktor-faktor seperti persepsi, emosi, motivasi, dan suasana hati dapat memengaruhi proses tersebut. Keputusan individu juga dipengaruhi oleh komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, politik, serta konflik dan negosiasi di tingkat kelompok. Perencanaan merupakan teknik yang memungkinkan untuk memberikan kontribusi pada suatu masalah sebelum tahap pengambilan keputusan. Proses perencanaan melibatkan langkah-langkah seperti membuat daftar alternatif, menilai konsekuensi dari setiap alternatif, dan melibatkan keahlian dari semua bagian organisasi tanpa memandang otoritas hierarki. Perencanaan juga mencakup peninjauan, yang mendorong pertanggungjawaban atas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu, melibatkan orang-orang di semua tingkatan dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemimpin di sektor publik memegang peran kunci dalam memastikan integritas dan keberlanjutan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sektor publik harus melibatkan pengumpulan informasi yang komprehensif, serta mendapatkan ide dan perspektif dari berbagai pihak terlibat. Sehingga, peneliti dan praktisi di sektor publik perlu terus menerus menilai dan memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, seperti praktik terbaik, konferensi, dan penelitian. Serta menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan menghargai upaya pembelajaran, sehingga dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Creswell (2016) menyebutkan bahwasanya penelitian kualitatif yakni berbagai metode untuk mengeksplorasi serta memahami terkait makna oleh beberapa individu maupun sekelompok orang yang dinilai berasal dari masalah kemanusiaan atau sosial. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kasus,

menurut Creswell, John. W. (2016) mengutarakan bahwasanya studi literatur yakni rangkuman secara tertulis yang berasal dari artikel atau jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang memaparkan terkait teori dan juga informasi baik di masa lalu atau kini lalu mengelompokkan pustaka kepada topik serta dokumen yang diperlukan. Penulis menggunakan artikel, buku, serta website yang berkenaan dengan teori filsafat administrasi, pengambilan keputusan, dan analisis kebijakan stunting sebagai bahan referensi yang dituangkan dalam hasil penelitian.

HASIL

Analisis Pendekatan Filsafat dalam Kebijakan Stunting

1) Ontologi

Fenomena stunting dapat dilihat melalui pendekatan ontologis yakni terdapat hak empiris berupa adanya kejadian stunting yang terjadi. Bentuk dari fenomena serta objek empiris yang dimaksud ialah yang bisa diterima, amati serta diuji oleh panca indra. Sebab memang suatu hal tersebut baru dapat dinyatakan ilmu ketika sudah dibuktikan dari segi empiris serta metodologis. Stunting dapat terjadi dikarenakan terdapat fakta bahwa fenomena ini sudah dialami banyak orang dan bisa dilihat dampaknya serta sudah dibuktikan gejala dan pencegahannya secara medis. Kejadian tersebut tentunya merupakan objek material pada tahap ontologis. Objek formalnya yakni asumsi serta hipotesis terkait mengapa kejadian stunting bisa terjadi serta apa dampaknya. Dalam tatanan aspek ontologi, hal paling dasar ialah untuk apa fenomena stunting tersebut diangkat sebagai fokus penelitian. Tentunya untuk memberikan informasi dan ilmu.

Hakikat yang mempengaruhi strategi penanganan stunting adalah melalui penelitian ilmiah. Selain faktor penekanan kurang gizi, stunting dipengaruhi pula dengan fakta dimana dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas jika tak ditangani. Dengan demikian, terdapat berbagai strategi yang bisa dilaksanakan dalam mencegah maupun menangani stunting. Strategi utamanya yakni mencegah determinan stunting agar tidak terjadi stunting.

2) Epistemologi

Pendekatan epistemologi pada fenomena stunting yakni fase selanjutnya dari ontologis, yakni stunting menjadi pengetahuan serta ilmu baru. Fenomena stunting telah banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ilmiah tersebut dilakukan agar mampu memberikan informasi dan wawasan bahwa urgensi kasus stunting penting untuk diteliti serta ditelusuri solusinya. Kebenaran akan stunting telah ditelaah para ahli medis maupun Kemenkes lewat uji ilmiah. Diutarakan bahwa stunting disebabkan dari gizi serta status kesehatan mencakup ketahanan pangan, lingkungan kesehatan (pelayanan preventif & kuratif, akses), lingkungan sosial (makanan bayi serta anak, pendidikan, *hygiene*, norma, tempat kerja) serta lingkungan pemukiman (sanitasi, air, serta kondisi bangunan).

Dilihat melalui aspek epistemologi dari stunting yakni sebuah unsur atau status gizi kronis. Dapat dideskripsikan pula sebagai gangguan kondisi sosial ekonomi secara menyeluruh di masa pertumbuhan sebelumnya serta di dua tahun awal kehidupan anak. Selain itu, stunting memiliki dampak yang sukar untuk diperbaiki. Sumber data dalam penelitian terkait stunting pun dijadikan indikator pengukuran untuk merumuskan solusi alternatifnya. Diantaranya dapat diperoleh melalui *website* tertentu. Seperti buku, jurnal, atau bahkan wawancara serta observasi kepada Dinas Kesehatan. SSGI atau Studi Status Gizi Indonesia pada tahun 2021 mengemukakan terkait prevalensi stunting di Indonesia hingga meraih 24,4% . Sehingga, stunting masih dijadikan persoalan gizi terbanyak yang diidap balita ataupun anak usia 5 tahun kebawah di negara Indonesia.

3) Aksiologi

Fenomena kelanjutan setelah ontologi dan epistemologi tersebut memiliki hasil yang semakin kuat. Bertujuan agar dapat dikatakan sebagai pengetahuan atau ilmu. Pada pendekatan aksiologi sendiri memiliki tataran yakni dalam mempertanyakan tentang kegunaan pengetahuan. Stunting sendiri telah diketahui penyebab dan pemaparannya. Baik secara metodis maupun ilmiah dari terjadinya stunting. Aspek aksiologi dari fenomena tersebut dapat dilihat melalui adanya kebijakan tentang stunting. Kebijakan yang khusus terkait stunting diterbitkan pada tahun 2021 yakni Peraturan Presiden Nomor 72 terkait Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, nilai atau manfaat dari fenomena stunting tersebut adalah diperlukannya langkah strategis dalam pencegahan serta kewajiban mengutamakan kesehatan.

Nilai kesehatan, keadilan sosial, dan hak anak menjadi output dari landasan aksiologi stunting. Aksiologi mengklasifikasikan dua kategori ilmu yakni 1) ilmu bebas nilai serta 2) tentang

nilai. Oleh sebab itu, fenomena stunting sebelumnya akan dijadikan pengetahuan. Selanjutnya, dinilai oleh individu terkait apakah pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya atau hanya akan sia-sia tanpa ada arti. Dengan demikian, akan semakin banyak pengetahuan serta penelitian terkait stunting dan terdapat pula berbagai indikator lain. Terutama indikator sosial serta dampak dari kejadian stunting agar menjadi acuan bagi pihak berwenang supaya bisa melaksanakan tindakan preventif. Khususnya untuk masyarakat umum yang dapat mengetahui lebih detail tentang stunting, faktor penyebabnya, dan efek jangka panjang dari kejadian stunting tersebut.

Integrasi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Mengatasi Masalah Stunting di Indonesia

Ilmu sifatnya netral, akan tetapi netralisasi ilmu sebatas dari epistemologinya saja ataupun bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu. Sementara itu, dari segi aksiologi serta ontologi ilmu tidak bebas dari nilai utamanya. Pada aksiologi, ilmu menjadi landasan moral dalam berperan terhadap berbagai profesi. Salah satunya yakni tenaga medis. Landasan moralnya dapat dilihat melalui hal-hal yang mendasari seluruh keputusan untuk melaksanakan tindakan medis. Sudah seharusnya tenaga medis melaksanakan tindakan berdasarkan etika dan landasan moral yang baik. Sehingga, prosedur dan indikasi medis akan sesuai dengan ilmu yang didapat lewat pendidikan formal. Dalam mewujudkan tujuan dari ilmu kesehatan pada masyarakat, dapat melalui upaya promotif serta preventif. Rehabilitatif atas penyakit bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien terutama stunting. Untuk memahami dan mencegah stunting, landasan lokal serta kompetensi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dapat ditinjau melalui sosialisasi. Dapat dilaksanakan terhadap masyarakat, dilaksanakan kebijakan sesuai SOP, dan meningkatkan sarana prasarana di setiap wilayah untuk Posyandu atau area pencegahan stunting lainnya. Upaya preventif yang menjadi tujuan dari ilmu kesehatan dalam hal stunting yakni pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri, memeriksa kehamilan, memberi makanan tambahan untuk ibu hamil dalam mencukupi kandungan gizi maupun zat besinya, serta memberi makanan tambahan yakni protein hewani. Seperti telur, ayam, ikan, susu, dan daging pada anak yang berusia 6-24 bulan.

Hubungan Pendekatan Filsafat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah melalui Penanganan Kebijakan Stunting

Permasalahan stunting merupakan sebuah prioritas pemerintah. Stunting pada dasarnya dapat dikatakan sebagai permasalahan pada tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak mencukupi. Dampak dari adanya stunting bagi anak akan terasa pada masa yang akan datang dan akan sulit untuk diatasi. Sehingga, upaya pemerintah dalam mengentaskan stunting merupakan sebuah prioritas. Berdasarkan perspektif filsafat, permasalahan terkait stunting dapat dieksplorasi melalui aspek filsafat ilmu. Hal tersebut mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi stunting dianggap sebagai objek empiris dengan dampak material, dibuktikan melalui gejala dan pencegahan medis. Strategi penanganan stunting melibatkan penelitian ilmiah dan pencegahan determinan stunting. Epistemologi akan membahas stunting melalui penelitian ilmiah, agar dapat memperkuat pengetahuan tentang permasalahan stunting tersebut. Umumnya dengan fokus pada status gizi, lingkungan, dan faktor sosial. Kemudian hasil dari ontologi dan epistemologi, yakni aksiologi. Dalam kasus ini aksiologi memunculkan kebijakan. Seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Nilai kesehatan, keadilan sosial, dan hak anak menjadi landasan dalam aspek aksiologi. Dengan memahami pendekatan-pendekatan filsafat tersebut pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam merumuskan implementasi kebijakan dan tindakan preventif terkait stunting.

Anak-anak yang mengidap stunting akan merasakan pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat serta berbagai dampak lain yang akan ditimbulkan. Faktor kontekstual dari stunting dapat dilihat melalui ekonomi, politik, kesehatan, sistem perawatan kesehatan, pendidikan, budaya, pertanian, sistem pangan, air, sanitasi, serta lingkungan. Dengan demikian, intervensi program dan kebijakan pemerintah Indonesia yang dilaksanakan supaya memberi pencegahan stunting harus didasarkan pada penilaian yang cermat. Pihak-pihak pemerintah yang terlibat pada faktor kontekstual tersebut harus melalui seluruh tingkatan. Baik pemerintah pusat maupun daerah. Pengambilan keputusan dalam program dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengentaskan stunting

melibatkan pengumpulan informasi yang komprehensif, serta mendapatkan ide dan perspektif dari berbagai pihak terlibat. Pemerintah awalnya mengambil keputusan dalam upaya memberantas stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi. Namun, hal tersebut ternyata belum dapat mengakomodasi dari upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara efektif. Sehingga peraturan tersebut perlu diganti. Hasilnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, diadakan pula upaya percepatan penurunan stunting. Hal tersebut termasuk kedalam program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dikarenakan target nasional tingkat prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 diupayakan akan menurun hingga 14%.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberantas stunting. Diantaranya pemerintah melakukan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik ialah aktivitas yang berlangsung guna menuntaskan faktor langsung yang menyebabkan stunting. Sedangkan, intervensi sensitif ialah aktivitas yang berlangsung guna menuntaskan faktor tidak langsung yang menyebabkan stunting. Percepatan penurunan stunting dapat dikatakan sebagai seluruh usaha yang meliputi intervensi-intervensi yang terjadi. Baik spesifik dan sensitif. Hal tersebut akan berlangsung secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor. Termasuk daripada pemerintah pusat, daerah, dan desa. Dalam rangka mempercepat penurunan stunting, ditetapkan pula Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Bertujuan agar mengurangi prevalensi stunting melalui peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Sasaran dari pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 mengenai stunting akan tercapai dengan melaksanakan 5 pilar yang ada pada strategi tersebut. Yakni dengan, meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah, meningkatkan komunikasi perubahan perilaku masyarakat, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, serta memperkuat serta mengembangkan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Pelaksanaan akan strategi tersebut nantinya akan ditinjau ulang sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian target prevalensi stunting pada tahun 2024.

Permasalahan stunting menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Jika ditinjau melalui perspektif pendekatan filsafat ilmu, maka akan membantu menguraikan kompleksitasnya melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Keputusan pemerintah dalam mengatasi stunting mencakup pemahaman ontologis tentang fenomena, pengetahuan ilmiah dalam epistemologi, dan nilai-nilai aksiologi yang mendasari kebijakan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, pemerintah memperkuat langkah-langkah intervensi spesifik dan sensitif dalam mempercepat penurunan stunting, menetapkan Strategi Nasional dengan lima pilar utama, dan menentukan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Evaluasi pencapaian target yang dilakukan pada tahun 2030 akan menandai komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan upaya pencegahan stunting secara holistik dan integratif.

Evaluasi Pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kebijakan Stunting dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak

Stunting ialah keadaan dimana pertumbuhan anak mengalami hambatan. Baik dalam hal fisik maupun kognitif, karena minimnya gizi yang diperoleh dalam waktu yang penting. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan stunting pada balita. Rumah tangga yang miskin tidak akan bisa mencukupi asupan gizi dan akses layanan kesehatan. Menurut data pada tahun 2022, tingkat prevalensi stunting di Indonesia telah menjadi fokus pemerintah yang kemudian mengurangi jumlah stunting dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6%. Perihal tersebut sangat memberikan manfaat yang baik karena stunting dapat menurunkan kemampuan anak untuk belajar serta adanya penyakit kronis. Kasus ini dapat dikorelasikan dengan evaluasi pengambilan keputusan agar pemerintah dapat mengetahui dampak dari keputusan yang diambil untuk penurunan stunting.

Kementerian Kesehatan Indonesia mengumumkan perolehan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang memperlihatkan penurunan angka stunting. Target angka prevalensi stunting pada tahun 2024 adalah 14%. Supaya meraih target tersebut, pemerintah berusaha untuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Usaha tersebut meliputi intervensi gizi pada ibu sebelum dan ketika

hamil serta intervensi pada anak usia 6 - 2 tahun. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan bahwa, terdapat upaya pemerintah dalam memitigasi atau mengatasi potensi dampak negatif dari stunting. Hal tersebut termasuk kemungkinan terjadinya ketidaksetaraan akses atau penyalahgunaan kebijakan, melibatkan infrastruktur dan lembaga terkait, seperti air bersih, sanitasi, dan rumah yang sehat. Kemenkes juga melaksanakan intervensi spesifik. Melalui dua cara utama yaitu intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil dan intervensi pada anak usia 6 sampai 2 tahun.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyoroti pentingnya memantau stunting demi mempersiapkan generasi emas di masa depan. Dikarenakan pada fase bonus demografi dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas serta produktif untuk memajukan Indonesia agar semakin mampu bersaing dengan negara lain. Selain itu, Kementerian Kesehatan dan BKKBN melakukan evaluasi periodik untuk mengidentifikasi masalah dan kendala dalam penurunan angka stunting, serta menghasilkan rencana yang tepat untuk mencapai target. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas negara melalui persiapan generasi emas dalam bonus demografi.

Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 9.54%. Kementerian Kesehatan dan BKKBN melakukan beberapa upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yang diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka stunting seperti, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, memeriksa kehamilan dan memberi asupan tambahan untuk ibu hamil supaya memenuhi gizi dan zat besi pada ibu hamil, serta memberi makanan tambahan berbentuk protein hewani pada anak usia 6-24 bulan. Seperti telur, ikan, ayam, daging, dan susu. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan angka kemiskinan dan stunting dapat diturunkan. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam memitigasi atau mengatasi potensi dampak negatif meliputi kemungkinan terjadinya ketidaksetaraan akses atau penyalahgunaan kebijakan. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan anak-anak di Indonesia.

Kementerian Kesehatan Indonesia menyelenggarakan program prioritas di 10 kabupaten di Jawa Barat untuk mengatasi stunting. Program ini melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang mencakup 10 kabupaten, 10 kota, 10 kecamatan, dan 10 desa di 10 kabupaten prioritas. TPPS menghadiri acara tersebut secara langsung kemudian sesi *coaching* klinik dan Penyusunan Rencana Kerja dengan pendampingan para penanggung jawab. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyoroti pentingnya mengawal stunting guna mempersiapkan generasi emas di masa depan. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan anak-anak di Indonesia.

Dengan demikian, isu stunting dalam mengatasi masalah kesehatan anak sangat erat kaitannya dengan penilaian pengambilan keputusan karena adanya analisis data, kolaborasi antar pemangku kepentingan, infrastruktur, intervensi kesehatan, program prioritas, dan upaya pengentasan kemiskinan. Evaluasi merupakan alat penting untuk mengukur efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil konsisten dengan tujuan mengurangi stunting dan kemiskinan.

SIMPULAN

Permasalahan stunting menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak. Untuk menyikapi fenomena stunting diperlukan pendekatan filosofis yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi digunakan untuk memahami fenomena stunting sebagai objek empiris, epistemologi dapat mendasari pengetahuan ilmiah terkait stunting, dan aksiologi sangat berguna untuk mengevaluasi manfaat dari pengetahuan tersebut. Dalam menangani kasus stunting di Indonesia, pemerintah melibatkan evaluasi pengambilan keputusan yang melibatkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Keputusan tersebut tertera pada Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam konteks ini, nilai kesehatan, keadilan sosial, dan hak anak menjadi landasan aksiologi yang mendasari kebijakan pemerintah.

Upaya pencegahan stunting melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak kebijakan dan mengidentifikasi kendala. Strategi nasional mencakup peningkatan kualitas kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan pelayanan kesehatan, dan akses air minum. Pengentasan stunting juga berkaitan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan. Kementerian Kesehatan dan BKKBN melakukan upaya, seperti pemberian TTD, memeriksakan kehamilan, dan memberi asupan tambahan. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan anak-anak dan

menyiapkan generasi emas di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi, pemerintah dapat memahami dampak kebijakan dan mengidentifikasi solusi untuk meraih target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024. Dalam konteks ini, evaluasi bukan hanya alat pengukur efektivitas kebijakan, tetapi juga langkah awal untuk meningkatkan kualitas negara melalui persiapan generasi emas dalam bonus demografi.

SARAN

Untuk menghadapi tantangan stunting, terdapat beberapa saran berdasarkan kesimpulan di atas. Pertama, penguatan pendekatan filosofis, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Perlu terus diutamakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan stunting. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap fenomena stunting sebagai objek empiris, penguatan pengetahuan ilmiah, dan evaluasi terus-menerus terhadap manfaat dari pengetahuan tersebut. Kemudian pemerintah dapat mengoptimalkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dengan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan konsistensi kebijakan dengan nilai-nilai aksiologi seperti kesehatan, keadilan sosial, dan hak anak. Kolaborasi antarsektor juga berperan penting dalam pencegahan stunting dengan melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan pangan. Selain itu, diperlukan perbaikan kualitas kehidupan keluarga dengan memenuhi asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan akses air minum. Pemerintah dapat melakukan evaluasi berkelanjutan yang bertujuan untuk mengintegrasikan kasus stunting dalam semua kebijakan, melibatkan penilaian dampak kebijakan, identifikasi kendala, dan penyesuaian solusi. Supaya Indonesia dapat meraih target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024. Kemudian, pemerintah dapat memperkuat infrastruktur dan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah dengan peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, terutama di daerah rentan stunting. Terakhir, dapat dilakukannya program edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai stunting, gizi, dan perawatan anak agar masyarakat dapat memahami pentingnya kesehatan. Melalui implementasi saran-saran tersebut, diharapkan pemerintah dapat secara efektif mengatasi permasalahan stunting dan mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (I). PUSTAKA BELAJAR
- (n.d.). Stunting - Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil. Retrieved December 3, 2023, from <https://stunting.go.id/>
- Indonesia Masih Darurat Stunting*. (2023, March 22). Koran Sulindo. Retrieved December 2, 2023, from <https://koransulindo.com/indonesia-masih-darurat-stunting/>
- Kemendes. 2022. 3 Upaya Penting dalam Menurunkan Stunting. <https://ayosehat.kemkes.go.id/3-upaya-penting-kemendes-dalam-menurunkan-stunting>
- Kementrian Kesehatan. 2023. Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6%. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- KUNCORO, M. R. A. (2023, June 19). *Kabupaten Tegal*. Kabupaten Tegal. Retrieved December 3, 2023, from https://utama.tegalkab.go.id/news/view/artikel/analisis_kebijakan_penanggulangan_penurunan_stunting_di_indonesia_20230619163716
- 149 Juta Anak di Dunia Alami Stunting Sebanyak 6,3 Juta di Indonesia, Wapres Minta Keluarga Prioritaskan Kebutuhan Gizi*. (2023, July 6). PAUDPEDIA. Retrieved December 2, 2023, from <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/149-juta-anak-di-dunia-alami-stunting-sebanyak-63-juta-di-indonesia-wapres-minta-keluarga-prioritaskan-kebutuhan-gizi?do=MTY2NC01YjRhOGZkNA==&ix=MTEtYmJkNjQ3YzA=>
- Ongaro, E. (2020). *Philosophy and Public Administration: An Introduction*. Edward Elgar Publishing.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2019. Mengawal Stunting untuk Menyiapkan Generasi Emas di Masa Mendatang. <https://diskominfotik.ntbprov.go.id/post/mengawal-stunting-untuk-menyiapkan-generasi-emas-di-masa-mendatang335.html>
- PHILOSOPHY | English meaning - Cambridge Dictionary*. (n.d.). Cambridge Dictionary. Retrieved December 2, 2023, from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/philosophy>

- Rahmah dkk. (2023). Hubungan Pendidikan Ibu Dan Keterpaparan Informasi Stunting Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting. Volume 6 Edisi 1 Februari 2023 <https://www.scribd.com/document/521734940/UTS-Filsafat-Ilmu>
- Rokom. (2023). Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/#:~:text=Kementerian%20Kesehatan%20mengumumkan%20hasil%20Survei,21%2C6%25%20di%202022.>
- Robbins, S. P., Judge, T. A., & Judge, T. (2018). *Essentials of Organizational Behavior*. Pearson.
- Rokom. (2023, January 25). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. Sehat Negeriku. Retrieved December 2, 2023, from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Sarder, R. (2016). *Building an Innovative Learning Organization: A Framework to Build a Smarter Workforce, Adapt to Change, and Drive Growth*. Wiley.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior : a study of decision-making processes in administrative organizations*. Free Press.
- Steup, M., & Neta, R. (2005, December 14). *Epistemology* (*Stanford Encyclopedia of Philosophy*). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved December 2, 2023, from https://plato.stanford.edu/entries/epistemology/?utm_medium=podcast&utm_source=bc&utm_campaign=gold-exchange-with-keith-weiner
- WHO TEAM. (2016, April 7). *Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences - Conceptual framework*. World Health Organization (WHO). Retrieved December 3, 2023, from <https://www.who.int/publications/m/item/childhood-stunting-context-causes-and-consequences-framework>